ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Crossref, Garuda, Google Scholar, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v4i4.3448

PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL (STUDI KASUS DI DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN)

Social Inclusion-Based Library Transformation Program (A Case Study at the Library and Archives Office of Padang Pariaman Regency)

Serlina Agustin & Yona Primadesi
Universitas Negeri Padang
serllinaagustin@gmail.com; yona2154@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 15, 2024	Jul 19, 2024	Jul 22, 2024	Jul 25, 2024

Abstract

This research aims to describe the Social Inclusion-Based Library Transformation Program at the Archives and Library Office of Padang Pariaman Regency based on connectivity, content, and human aspects. This type of research is qualitative research using descriptive methods. There are 2 informants in this study consisting of 1 first expert librarian and 1 young expert librarian. Data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation methods. Data analysis techniques were carried out in three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research conducted, it shows that the Social Inclusion-Based Library Transformation Program is based on three aspects, namely. (1) Connectivity aspect: infrastructure facilities for people with disabilities; efforts to reach out to users have not been carried out effectively; and the OPAC library material search system that does not function properly. (2) Content Aspect, there is no collection for people with disabilities; and library socialization to the community has not been carried out thoroughly. (3) Human Aspect: the community is less responsive; budget limitations; and the partnership network with various parties is not yet widespread. The

Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

efforts made by the Office of Archives and Libraries of Padang Pariaman Regency in overcoming obstacles are to establish partnerships with village library managers.

Keywords : Transformation Program, Library, Social Inclusion

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman berdasarkan aspek connectivity, aspek content, dan aspek human. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Terdapat 2 informan dalam penelitian ini yang terdiri dari 1 orang pustakawan ahli pertama dan 1 orang pustakawan ahli muda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penganalisisan data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial berdasarkan ketiga aspek yaitu. (1)AspekConnectivity: fasilitas sarana prasarana bagi penyandang disabilitas; upaya menjangkau pemustaka belum terlaksana secara efektif; dan sistem penelusuran bahan pustaka OPAC yang tidak berfungsi dengan baik. (2) Aspek Content, belum tersedia koleksi untuk penyandang disabilitas; dan sosialisasi perpustakaan kepada masyarakat belum dilaksanakan secara menyeluruh. (3) Aspek Human: masyarakat yang kurang merespon; keterbatasan anggaran; dan belum meluasnya jaringan kemitraan dengan berbagai pihak. Upaya yang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman dalam mengatasi hambatan yaitu dengan menjalin kemitraan dengan pihak pengelola perpustakaan desa.

Kata Kunci : Program Transformasi,Perpustakaan, Inklusi Sosial

PENDAHULUAN

Perpustakaan memegang peranan yang sangat penting dalam penyebaran informasi karena di dalam sebuah perpustakaan terdapat banyak sekali buku dan setiap buku memuat informasi yang beragam, sangat bermanfaat bagi pembaca. Perpustakaan dibedakan menjadi beberapa jenis salah satunya perpustakaan umum. Perpustakaan umum merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang mereka.

Pada standar yang ditetapkan oleh Perpusnas RI pada tahun 2011 tertulis bahwa perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukkan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat (Zen & Wuryani, 2011). Lebih lanjut, perpustakaan umum memberikan layanan tanpa memandang ras, kebangsaan, usia, jenis kelamin, agama, bahasa, difabel, status sosial, dan ekonomi (IFLA, 2010). Dari penjelasan yang ada, perpustakaan umum sangat berperan dalam meempromosikan aspek multikultural dalam melayani masyarakatnya. IFLA & UNESCO (2012) menjelaskan aspek multikultural yaitu kesetaraan dalam mengakses informasi dan pengetahuan dibalik perbedaan budaya yang ada pada setiap masyarakatnya.

Istilah inklusi sosial dalam kajian ilmu perpustakaan dapat dikatakan masih baru. Istilah ini lazim digunakan sekitar awal tahun 2019. (Iswandi, 2021) Dari perspektif sejarah, konsep inklusi sosial mulai dikenal publik pada tahun 1970-an di Prancis sebagai respon terhadap krisis kesejahteraan di negara-negara Eropa, yang memiliki dampak yang meningkat pada kerugian sosial di Eropa. Konsep ini menyebar ke seluruh Eropa dan Inggris sepanjang tahun 1980-an dan 90-an. Konsep ini mendapatkan perhatian yang luas setelah dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi World Summit for Social Development, Copenhagen, Denmark, 6-12 March 1995 atau dikenal dengan Copenhagen Declaration on Social Development. Deklarasi pembangunan sosial ini menekankan pada konsensus program aksi baru tentang perlunya menempatkan masyarakat di pusat pembangunan.

Deklarasi *World Summit of Information* (WSIS) tahun 2003 menyatakan bahwa membangun masyarakat yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat menciptakan, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang proaktif membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial.

Inklusi sosial adalah pendekatan berbasis *system social approach* atau pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*). Pendekatan inklusif memandang perpustakaan merupakan sub sistem sosial dalam sistem kemasyarakatan. Untuk itu, perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi di masyarakat. Melalui pendekatan inklusif perpustakaan mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh solusi, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Pada laman website Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perpustakaan Nasional (2023), selama periode Januari-September 2023 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengimplementasikan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan jumlah mitra sebanyak 34 perpustakaan provinsi, 399 perpustakaan kabupaten/kota, dan 2.909 perpustakaan desa/kelurahan. Dari jumlah diatas, semua provinsi telah menginput data implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota hanya 319 perpustakaan yang menginput implementasi program di SIM sedangkan di tingkat

desa/kelurahan hanya terdapat 1.210 perpustakaan yang menginput hasil implementasi mereka ke dalam laman SIM. Sejak Januari-September 2023 mitra program telah melakukan sebanyak 66.108 kegiatan di perpustakaan baik tingkat kabupaten/kota maupun desa/kelurahan. Pada setiap kegiatan pelibatan masyarakat, perpustakaan telah melibatkan sebanyak 1.480.564 peserta. Berdasarkan data pelibatan masyarakat di laman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia jumlah peserta perempuan mendominasi yaitu sebanyak 3.012 dibanding jumlah peserta laki-laki dengan total 1.831 orang dalam setiap pelatihan yang diadakan perpustakaan. Selain itu, tercatat per Februari 2024 kegiatan promosi lebih banyak dilakukan sekitar 630 dibanding kegiatan pelatihan yakni hanya sekitar 402.

Permana (2019) mengatakan bahwa perpustakaan yang berbasis inklusi sosial telah melibatkan masyarakat untuk mengembangkan keahlian masing-masing individu. Teori Lev Vygotsky dan Jean Lave percaya bahwa suatu pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial (Agustina, 2019). Dengan demikian, setiap perpustakaan inklusi sosial harus memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan sosial semua lapisan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut sehingga masyarakat dapat mendapatkan pembelajaran melalui layanan atau kegiatan yang dilakukan. Sama halnya dengan Utami dan Prasetyo (2019) mengatakan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial didefinisikan sebagai perpustakaan yang menawarkan jasa layanan informasi yang terbuka bagi seluruh masyarakat dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, maupun budaya untuk mengembangkan potensi diri guna meningkatkan ekonomi. Haryanti (2019) mengatakan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, dan jejaring sosial. Selain itu, perpustakaan juga mendukung komunitas, orang dewasa, serta keluarga untuk belajar di perpustakaan (Departemen Informasi dan Perpustakaan, 2020). Perpustakaan dapat dikatakan sudah berbasis inklusi sosial apabila menjadi wadah yang memfasilitasi masyarakat dalam megembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, menawarkan kesempatan untuk berusaha, serta melindungi dan memperjuangkan budaya maupun hak asasi manusia (Kamalludin, 2023).

Dilihat dari sebagian besar perpustakaan di Indonesia, khususnya perpustakaan umum, masih banyak perpustakaan yang tidak menyediakan koleksi yang berorientasi pada masyarakat, sarana dan prasarana, layanan atau bentuk iklan yang mudah dikecualikan. Untuk itu, konsep perpustakaan yang berbasis inklusi sosial harus memastikan pengembangan perpustakaan

mampu menyediakan koleksi, infrastruktur, layanan, promosi perpustakaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan pembinaan dan pelatihan masyaraka yang lebih terfokus pada kelompok yang mudah dikucilkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyelidiki apakah perpustakaan yang diubah menjadi perpustakaan inklusif secara sosial menyediakan koleksi, infrastruktur, layanan, promosi perpustakaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan pembinaan dan pelatihan masyarakat.

Berdasarkan observasi dari laman facebook perpustakaan yang bernama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dapat ditemukan foto-foto yang menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang pembinaan manusia, usaha dan lingkungan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai kegiatan pemberdayaan yang berhubungan dengan pengembangan diri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana kegiatannya berupa kegiatan pelatihan merajut, memasak, senam lansia dan fasilitas ruang belajar/berkarya untuk anak-anak di lingkup Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman yang menerima manfaat dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu kelurahan Kampung Perak, kelurahan Kampong Pondok, kelurahan Kampong Jawa 1 dan 2, kelurahan Alai Gelombang, kelurahan Lohong Pasir dan kelurahan Jawi-Jawi 1 dan 2.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman merupakan perpustakaan daerah yang berada di pusat kota Pariaman. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Bukti tersebut di dapatkan dari kegiatan pra-penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Perpustakaan ini sudah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial dimulai dari tahun 2021 dan sudah berjalan hingga saat ini. Hal tersebut terlihat dari layanan tambahan kepada mereka yang dianggap minoritas. Akan tetapi apakah layanan perpustakaan ini sudah berkembang sesuai konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial, terkait dengan penyediaan peralatan dan infrastruktur, layanan, promosi perpustakaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan pembinaan dan pelatihan masyarakat?. Hal ini menjadi pertanyaan penting, sebab pengelolaan perpustakaan berbasis inklusi sosial perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan penyelenggaraan dan penyediaan layananan perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat. Pada perpustakaan, pengelolaan yang dilakukan mau tidak mau mencakup beberapa bidang, meliputi koleksi, pelayanan,

prasarana, promosi perpustakaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan pembinaan dan pelatihan masyarakat .

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Program Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, dalam beberapa aspek, khususnya koleksi perpustakaan, pelayanan perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelengaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, promosi perpustakaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan pembinaan dan pelatihan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji bagaimana Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial terkait dengan penyediaan koleksi perpustakaan, pelayanan perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelengaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, promosi perpustakaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan pembinaan dan pelatihan masyarakat oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman demikianlah penelitian ini diberi judul "Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Studi Kasus di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman).

METODE

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam kajian ini merupakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Jl. A . Yani No.21, Pd. II, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengunakan metode pengumpulan data seperti pedoman wawancara yang dibantu dengan *handphone*, alat perekam, kamera, buku catatan dan alat tulis. Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengabsahan data (Helaluddin & Wijaya, 2019) yaitu: 1) perpanjangan keikut sertaan; 2) ketekunan pengamatan; dan 3) triangulasi. Teknik analisis data diterapkan dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang diproses secara interaktif melalui langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL. DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan membahas hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu Program Trnasformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial studi Kasus di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian ini akan diuraikan berdasarkan indikator perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ditetapkan oleh Haryanti (2019) yaitu: (1) aspek *connectivity*, (2) aspek *conten*t, dan (3) aspek *human* dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

1. Aspek *Connectivity*

Dalam mekanisme menyediakan layanan perpustakaan kepada penggunanya, aspek *connectivity* adalah hal yang penting. Hal ini menyangkut pengoptimalan infrastruktur perpustakaan sekaligus memastikan bahwa layanan yang diberikan efektif dan efisien secara keseluruhan. Maka, dalam hal ini infrastruktur perpustakaan berupa sarana prasarana perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat membantu para pemustaka memanfaatkan kekayaan perpustakaan secara maksimal.

a. Pemanfaatan Sarana dan prasarana dalam menujang kosep perpustakaan berbasis inklusi sosial

Untuk mendukung konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan harus menyediakan fasilitas yang sesuai dengan konsep tersebut, yaitu mencakup dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas yang tersedia di Dinas Perpustakaan termasuk gedung perpustakaan, perabotan, teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan transportasi untuk perpustakaan keliling.

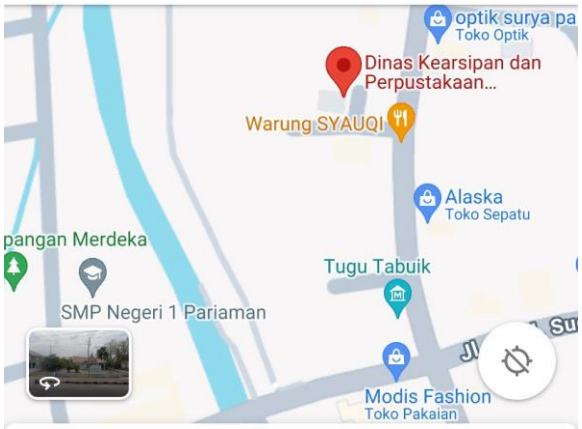


Gambar1. Gedung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman

Prasarana perpustakaan adalah mencakup gedung perpustakaan dan ruangan perpustakaan. Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 8 tahun 2017 Standar Nasional Perpustakaan

Kabupaten/Kota, luas gedung perpustakaan minimal adalah 0.008 m² per kapita dan bersifat permanen, yang mendukung pembangunan fisik yang berkelanjutan. Gedung tersebut memenuhi standar konstruksi, teknologi, kenyamanan, keamanan, kesehatan, kelengkapan, estetika, efektivitas, dan efisiensi. Berdasarkan Gambar 1 gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh sudah dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus. Saat ini gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh memiliki luas gedung 140 m². Gedung yang luas mampu memberikan tempat untuk pengembangan kegiatan dan fasilitas lainnya bagi pemustaka (Suprihatin, 2021). Dalam hal ini, gedung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman sudah mampu untuk memenuhi berbagai aktivitas dan kegiatan yang menunjang perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Di dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa lokasi perpustakaan harus mendukung kemudahan jangkauan masyarakat. Lokasi bangunan perpustakaan sebaiknya ditempatkan di area yang mudah diakses oleh semua masyarakat. Lokasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman berada di lokasi yang strategis. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama para informan dan pengamatan bahwa pada kenyataannya lokasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman berada di tengah Kota Pariaman dan saling berdekatan dengan sarana fasilitas pendidikan mulai dari SMP Negeri 1 Pariaman dan SMA Negeri 1 Pariaman.



Gambar2. Lokasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman

Lokasi perpustakaan yang strategis akan sangat membantu dalam mewujudkan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yangmaksimal untuk pemustaka. Pemustaka akan melihat jauh dekatnya perpustakaan, karena hal tersebut dapat meminimalkan waktu, tenaga dan biaya. Untuk itu, lokasi dari sebuah perpustakaan perlu mendapatkan perhatian yang serius

karena akan berpengaruh terhadap jumlah pemustaka. Berdasarkan Gambar 2 lokasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman sudah memenuhi SNP (Standar Nasional Perpustakaan) Kabupaten/Kota No. 8 tahun 2017 mengenai lokasi perpustakaan harus strategis agar mudah dijangkau masyarakat.

Fasilitas perpustakaan ialah kebutuhan yang diperlukan oleh pemustaka dengan mendapatkan bimbingan dari pustakawan (Kamaliyah & Rumani, 2015). Untuk itu, fasilitas perpustakaan harus dirancang sedemikian rupa untuk memastikan pengguna perpustakaan dapat memanfaatkan sumber daya perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Perpustakaan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan prima kepada pengunjungnya, perlu memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana agar pelayanan yang baik dan dapat memuaskan pemustaka dapat diwujudkan. Hal ini juga mencakup dukungan terhadap perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Menurut aturan SNP (Standar Nasional Perpustakaan) Kabupaten/Kota No. 8 tahun 2017, ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan pengelola yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik, setiap perpustakaan wajib memiliki sarana ruang penyimpanan koleksi, akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan, sarana ruang penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki. Berdasarkan aturan SNP, fasilitas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman memang sudah sesuai dengan kriteria sebelumnya. Hal ini berdasarkan hasil dari wawancara bersama informan yang menyatakan bahwa fasilitas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman sudah terdiri dari komputer, printer, server dan rak buku, yang merupakan bentuk fasilitas dari Perpusnas untuk melangsungkan program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Untuk ruang layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari layanan membaca ditempat, layanan referensi, layanan anak, dan layanan multimedia.

Namun, untuk mendukung konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman belum memenuhi kriteria tersebut. Berdasarkan RKP 2019: Arah Kebijakan Pembangunan Perpustakaan, mengenai Pengembangan Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, perpustakaan harus melakukan pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sementara, berdasarkan hasil wawancara bersama informan bahwasannya sarana prasarana untuk penyandang disabilitas belum tersedia. Hal ini mengindikasikan bahwa belum tersedianya layanan perpustakaan

berbasis inklusi sosial yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman untuk semua kalangan masyarakat. Pelayanan kepada pemustaka penyandang disabilitas merupakan upaya pemberdayaan dan peningkatan derajat kemanusiaan. Sarana prasarana untuk kaum penyandang disabilitas juga menjadi penunjang agar perpustakaan dapat menampung pemustaka dengan berbagai latar belakang, dengan begitu perpustakaan sudah menerapkan konsep inklusi sosial karena menjadi tempat bagi masyarakat dari berbagai lapisan.

b. Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Perpustakaan Nasional selaku kepala sektor pada program perpustakaan berbasis inklusi sosial, menilai bahwa program perpustakaan berbasis inklusi sosial efektif untuk dikembangkan dan diperluas agar perpustakaan dapat bermanfaat bagi masyarakat (Alam & Kamil, 2021). Berdasarkan data dari Rakornas (2023), sepanjang tahun 2023 tercatat bahwa telah dilaksanakan 1.661 kegiatan pelatihan program perpustakaan berbasis inklusi sosial di seluruh perpustakaan umum di Indonesia. Termasuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman juga telah melangsungkan program kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariama sudah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2021. Karena sudah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman memiliki sejumlah program kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ditujukan untuk masyarakat luas. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan potensi mereka secara maksimal, guna memajukan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup. Berdasarkan jawaban dari informan dalam melangsungkan kegiatan-kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial ini sudah bersumber dari koleksi yang disediakan oleh perpustakaan. Dalam hal ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan aturan SNP (Stnadar Nasional Perpustakaan) Kabupaten/Kota tahun 2019 mengenai kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diadakan harus bersumber pada bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan. Adapun beberapa program perpustaakaan berbasis inklusi sosial yang telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sebagai berikut:

1) Pelatihan Merajut

Merajut adalah proes membuat kain atau tekstil dengan mengunakan jarum jahit dan benang. Hasil merajut ini bisa digunakan unuk alas bantal atau bisa juga digunakan di pakaian ataupun sepatu, sehingga hasil rajutan ini bisa diperjual belikan untuk menaikan taraf perekonomian masyarakat.



Gambar 3. Pelatihan merajut yang diadakan oleh Diskearpus Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwasannya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman telah melangsungkan kegiatan pelatihan merajut. Salah satu manfaat utama dari merajut adalah efek menenangkan pikiran dan kcemasan krena fokus pada pola dan grakan yang tratur. Program pelatihan merajut ini bisa menambah pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi yang mengikuti pelatihannya.

2) Pelatihan membibit

Pembibitan adalah kegiatan penyemaian dan pengembangan bibit untuk ditanam atau diternakkan. Hasil bibitan ini bisa berkembang dan menghasilkan untuk pengembangan budidaya pembibitan, sehingga masyarakat dapatmengunakan hasil panen



Gambar 4. Salah satu hasil bibitan yg ditanam oleh Diskearpus Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwasannya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman telah melangsungkan kegiatan pelatihan pembibitan dari foto tersbut telihat hasil pembibitan yang dilaksanakan oleh Diskearpus.. Adapun beberapa manfaat yang bisa didapat dari membibit tanaman di antaranya: (1) dapat memehami proses petumbuhan; (2) menumbuhkan kencintaan pada alam; (3) belajar bertangung jawab; dan (4) mlatih ketekunan. Program pelatihan membibit ini bisa menambah pengetahuan dan perasaan yang cukup bermanfaat bagi yang mengikuti pelatihannya.

3) Pelatihan senam

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman juga memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kebugaran jasmani dengan mengadakan kegiatan senam aerobik. Senam aerobik adalah kegiatan gerak yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan ritme yang teratur, menggunakan otot-otot besar, dan mengandalkan sistem energi aerobik. Kegiatan ini biasanya disesuaikan dengan irama musik tertentu, sehingga menghasilkan pola gerakan yang ritmis, berkesinambungan, dan dengan durasi tertentu. Tujuan utama dari senam aerobik adalah untuk meningkatkan dan menjaga kebugaran tubuh, serta bisa juga untuk tujuan lain seperti menurunkan berat badan. Latihan senam aerobik melibatkan gerakan yang melibatkan seluruh otot tubuh, terutama otot besar, dengan gerakan yang mantap, terus-menerus, ritmis, progresif, dan berkesinambungan (Listyarini, 2012).



Gambar 5. Lomba senam

Pada Gambar 5 terlihat bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman telah melangsungkan kegiatan senam aerobik. Berdasarkan hasil penelitian, instruktur dari senam aerobik meupakan salah satu staff dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman. Instruktur senam aerobik sendiri sebelum

memanda para pesertanya juga mempelajari gerakan-gerakan senam melalui bahan rujukan seperti buku maupun dari *youtube*. Dalam hal ini terlihat bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman telah mempersiapkan dengan baik dalam melangsungkan kegiatan terkait program perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Melalui kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial menciptakan ruang publik untuk berbagi pengalaman dan tempat menimba ilmu pengetahuan bagi semua kalangan masyarakat. Perlu adanya pergeseran persepsi tentang perpustakaan dari salah satu tempat membaca buku menjadi salah satu tempat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memberdayakan masyarakat yang mengubah kualitas hidup menuju ke arah yang sejahtera.

4) Wisata Edukasi Anak TK dan SD dilingkup Kab. Padang Pariaman

Dalam konteks seni rupa, terutama di kalangan anak-anak, ekspresi seni merupakanbentukaktualisasidiriyangsebagianbesarbersifatbermain. Ekspresi seni rupa pada anak TK dan SD mencerminkan kekuatan yang menunjukkan karakteristiknya, yang pada akhirnya penting untuk menciptakan karya seni. Ekspresi seni pada anak-anak TK dan SD seringkali unik, spontan, ekspresif, dan jujur. Karena itu, potensi ini harus dikembangkan dengan baik agar kreativitas mereka dapat diekspresikan dengan maksimal (Sulistyo, 2008).



Gambar 6. Kgiatan dukasi Wisata untuk TK dan SD

Pada Gambar 6 terlihat bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman telah melangsungkan kegiatan wisata edukasi untuk anak TK dan SD di lingkup Kab. Padang Pariaman. Wisata edukasi yang diberikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman beragam, salah satunya yaitu bermain sambil menggambar. Bermain sambil menggambar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan alat yang menghasilkan kesenangan dan mengembangkan imajinasi anak. Dalam hal

ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman telah membantu menyiapkan fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan yang berlangsung.

c. Sistem Penelusuran Bahan Pustaka

Sarana Penelusuran Informasi digunakan untuk membantu pemustaka dalam menemukan sumber rujukan dengan lebih mudah. Salah satu sarana yang disediakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman ialah OPAC (*Online Public Access Catalog*). OPAC ini berisi daftar koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan, memungkinkan pemustaka untuk mengetahui koleksi yang tersedia dan apakah perpustakaan memiliki koleksi yang mereka perlukan.

OPAC yang disediakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman berasal dari aplikasi INLISLite. Aplikasi INLISLite adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional tahun 2011. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk memberikan *software* bagi perpustakaan guna menerapkan otomatisasi kegiatan perpustakaan dan mengembangkan perpustakaan digital.

Namun, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan ditemukan bahwasannya sistem penelusuran bahan pustaka di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman belum optimal dalam menyediakan sistem penelusuran bahan pustaka. Hal ini ditandai dengan OPAC yang tersedia tidak dalam kondisi baik. OPAC di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat digunakan oleh pemustaka, akibat dari kabel server yang bermasalah. Sehingga untuk melakukan penelusuran informasi, pemustaka tidak dapat melakukannya secara mandiri, harus melalui bantuan dari komputer milik pustakawan yang berada di meja layanan.

Berdasarkan hasil aspek *connectivity* terhadap problematika mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial diperoleh bahwasannya. *Pertama*, fasilitas sarana prasarana yang belum optimal dalam menerapkan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial. Fasilitas sarana prasarana yang belum ramah untuk penyandang disabilitas. *Kedua,* kegiatan perpustakaan berbasis inklusi telah dilaksanakan secara rutin, namum hanya saja minat masyarakat yang kurang. *Ketiga*, OPAC sebagai sistem penelusuran bahan pustaka oleh pemustaka tidak berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kabel server yang bermasalah sehingga pemustaka tidak dapat melakukan penelusuran bahan pustaka secara digital.

d. Solusi dalam Mengatasi Berbagai Persoalan yang Dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Terkait Aspek *Connectivity*

Pertama, untuk mengatasi sarana dan prasarana yang belum tersedia bagi kaum penyandang disabilitas yaitu dengan mengusulkan anggaran khusus kepada pemerintah provinsi terkait. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli fasilitas sarana dan prasarana yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas.Selain itu, dinas perpustakaan juga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap kaum penyandang disabilitas. *Kedua,* untuk sistem penelusuran bahan pustaka yang tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya perlu ditindak lanjuti dengan melakukan perbaikan sesegera mungkin demi kelancaran aktivitas pemustaka dalam menemukan informasi yang diperlukannya.

2. Aspek *Content*

Aspek *content* mengacu pada kualitas dari sumber koleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Sumber koleksi akandigunakan sebagai media berkomunikasi dan bertukar ide, sehingga sumber koleksi harus berkualitas dan dapat dipercaya.

a. Koleksi Bahan Pustaka yang Belum Menunjang Konsep Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Jenis koleksi perpustakaan terbagi atas karya tulis (koleksi literature kelabu, manuskrip), karya cetak (buku dan terbitan berkala), karya rekam (koleksi audiovisual, rekaman video, dan rekaman suara), dan karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital (Hartono,2020). Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui dokumen yang diberikan pustakawan bahwa, saat ini total jumlah koleksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 7.818 judul dengan 15.550 eksemplar. Jenis koleksi yang disediakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari koleksi tercetak dan koleksi non cetak. Koleksi cetak yang disediakan terdiri dari koleksi fiksi, non fiksi,deposit, referensi, dan skripsi. Sementara, koleksi non cetak terdiri dari CD dan *E-Book*.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memberikan informasi serta layanan kepada seluruh lapisan masyarakat tenpa membeda-bedakan jenis kelamin, usia,

ras, suku, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu perpustakaan berbasis inklusi sosial harus mampu menyediakan koleksi yang mencakup kebutuhan seluruh masyarakat.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman sudah menyediakan berbagai jenis koleksi. Mulai dari koleksi buku maupun non buku, mulai dari buku fiksi, non fiksi, koleksi referensi, skripsi, hingga koleksi deposit. Namun, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman belum menyediakan koleksi untuk penyandang disabilitas. Sementara, dalamUndang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, disebutkan dalam Pasal 5 Nomor 3 bahwa kewajiban perpustakaan adalah memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan/kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial dan disesuaikan dengan keterbatasan masing-masing masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasannya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dalam melangsungkan kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah bersumber literasi dari koleksi yang disediakan oleh perpustakaan. Namun, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman belum menyediakan koleksi untuk penyandang disabilitas. Koleksi untuk penyandang disabilitas terdiri dari buku *braille* dan *audio book*. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman belum optimal untuk menerapkan konsep perpustakaan inklusi sosial, karena perpustakaan berbasis inklusi sosial seharusnya menyediakan kebutuhan bagi semua pengguna, termasuk koleksi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat disabilitas.

b. System pengadaan bahan Pustaka

Pengadaan bahan pustaka merupakan proses melestarikan dan mengembangkan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman melalui pembelian dan sumbangan atau hibah.

1) Pembelian

Pembelian bahan pustaka adalah kegiatan pengadaan bahan pustaka dengan jalan membeli koleksi tersebut dari para penjual. Untuk melakukan pembelian koleksi, pustakawan dibidang pengembangan koleksi harus melakukan seleksi bahan pustaka, untuk menemukan jenis koleksi yang paling dibutuhkan di perpustakaan, yaitu koleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembelian bahan pustaka yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman melalui toko buku dengan sumber dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang di dapatkan dari pemerintah kota dan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang di dapatkan melalui pemerintah provinsi.

2) Sumbangan atau hibah

Bahan pustaka dari sumbangan atau hibah merupakan koleksi yang di sumbangkan oleh pihak atau kelompok tertentu kepadasuatu perpustakaan. Selain dari pembelian, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan pengadaan bahan pustaka dengan menerima sumbangan atau hibahdari mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman menerima sumbangan atau hibah buku dari mahasiswa, guru dan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman. Sumbangan ini diberikan secara sukarela oleh yang bersangkutan.

3. Aspek *Human*

Aspek *human* menyangkut tentang SDM yang terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam hal ini perpustakaan yang berbasis inklusi sosial melaksanakan pendekatan kemanusiaan dengan mendampingi setiap masyarakat.

a. Masyarakat yang Kurang Berpartisipasi dalam Kegiatan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan menunjukkan kualitas dari kegiatan itu sendiri (Ardianto, 2018). Keberhasilan penerapan perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan mendukung keberlangsungan perpustakaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan jawaban dari informan ditemukan bahwa, saat awal penerapan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Seiring berjalannya waktu, antusias masyarakat menurun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti, latar belakang pekerjaan masyarakat dan kesadaran masyarakat masih rendah.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Padang Pariaman belum terlalu merespon kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hal ini terlihat dari jumlah partisipasi yang semakin hari semakin menurun ketika kegiatan tengah berlangsung.

Padahal, kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial diadakan tanpa memungut biaya sepersenpun dan tidak pula merugikan pihak manapun.

b. Dampak dalam Pelaksanaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Menurut Qomaria (2015), dampak dalam suatu pelaksanaan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan. Dampak dalam suatu pelaksanaan dapat berupa positif dan negatif. Dalam pelaksanaan peprustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat sekitar. Pelaksanaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat menjadi jembatan sebagai penyedia informasi sekaligus merangkul masyarakat dari berbagai latar belakang agar mendapatkan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, dampak dalam pelaksanaan perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman ialah berdampak positif. Hal ini berdasarkan wawancara bersama informasn yang menyatakan bahwa dengan adanya penerapan perpustakaan berbasis inklusi sosial, jumlah kunjungan pemustaka bertambah dan berubahnya cara pandang masyarakat yang selama ini menganggap perpustakaan hanya sebagai gudang buku.

c. **Solusi dalam Mengatasi Berbagai Persoalan yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman Terkait Aspek *Human***

Pertama, untuk mengatasi masyarakat yang kurang merespon adanya kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu pihak dinas perpustakaan dapat memberikan sosialisasi secara perlahan kepada masyarakat dan memberikan sedikit *reward* atau cenderamata untuk menarik masyarakat mengikuti kegiatan yang ada. *Kedua,* untuk mengatasi keterbatasan anggaran dana pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman melakukannya dengan kerjasama bersama pengelola perpustakaan desa, hal ini merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, namun pihak dinas perpustakaan juga dapat mencari sponsorlain baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. *Ketiga,* pihak dinas perpustakaan harus lebih gencar dalam melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan pihak lembaga manapun agar eksistensi perpustakaan tetap terjaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dilihat dari aspek teori perpustakaan berbasis inklusi sosial menurut Haryanti (2019) yaitu; aspek *connectivity,* aspek *content,* dan aspek *human*.

Berdasarkan aspek *connectivity* terlihat bahwasannya fasilitas sarana prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman belum mendukung konsep inklusi sosial, seperti: belum tersedianya fasilitas sarana prasarana untuk kaum penyandang disabilitas; dan sistem penelusuran bahan pustaka OPAC yang tidak dapat berfungsi dengan baik.

Berdasarkan aspek *content* terlihat bahwasannya koleksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman kurang mendukung konsep inklusi sosial, seperti: belum tersedianya koleksi khusus untuk penyandang disabilitas; dan sosialisasi perpustakaan ke masyarakat belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Berdasarkan aspek *human* terlihat bahwasannya SDM kurang mendukung konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial, seperti: masyarakat kurang merespon terkait adanya kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial; keterbatasan anggaran dana; dan belum meluasnya jaringan kemitraan dengan berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, Albi d (Setiawan, 2018), Johan Setiawan.(2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Agustina, S. (2019). Transformasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Yogyakarta: Suluh Media

Ardianto, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *17*(1), 36-45.

Aprillita, Dwi. "Efektivitas Program 'Perpuseru' Dalam Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Lubuk linggau." *UIN Raden Fatah Palembang* (2019).

Aysah, Siti. "Strategi dalam Mengembangkan Perpustakan B erbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan." *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,2023*.

Bahrony, D. A., Hanum, A. N. L., & Madeten, S. S. (2023). Peran jejak literasi (JeLi) Perpustakaan Umum Bahagia Mendawai dalam meningkatkan minat baca. *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, *11*(2), 157-166.

Dameis Surya Anggara, Candra Abdillah . *Modul metode penelitian*,2019. Dan Teknologi Nuklir Berbasis Inklusi Sosial."*Jurnal Pustakawan Indonesia* 20,no. 2(2019): 60–74.

Diana, Diana. "Dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Penelitian Pada Perpustakaan Desa Simpang Utama Kabupaten Bener Meriah)." *Universitas Islam Negeri ArRaniry Darussalam Banda Aceh*, 2022.

IFLA, & UNESCO. (2012). IFLA/UNESCO multicultural library manifestoimplementation kit. December, 1–14. https://www.ifla.org/files/assets/libraryservices-to-multicultural-populations/publications/ifla-unesco-multiculturallibrary-manifesto_implementation-kit_2012-12.pdf

Izzah, R. N., Sukaesih, S., Rukmana, E. N., & Saefudin, E. (2021). Inovasi Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Mengembangkan Layanan Berbasis Inklusi Sosial Saat Pandemi Covid-19. *ACARYA PUSTAKA: Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*, *8*(1), 53-69.

Kautsar, R., Ilhami, H., & Effendi, M. N. (2022). Preservasi bahan pustaka di Perpustakaan Umum Kota Banjarmasin. *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, *10*(1), 49-58.

Khairunisa, Wenny Dastina, Buchari Katutu. "Strategi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Jambi dalam Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Literate."*Baitul'Ulum:JurnalIlmuPerpustakaandanInformasi,*4,no.2 (2020): 74–88.

Kurniasih, RrIri dayanti, dan Rahmat Setiawan Saefullah."Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan di Perpustakaan Daerah Karanganyar." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 7, no. 2 (2021): 149–160.

Kusumaningrum, D. E., Gunawan, I., Sumarsono, R. B., & Triwiyanto, T. (2019). Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan untuk Mendukung Gerakan Literasi Sekolah. *Abdimas Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, *2*(3), 164-169.

Majnun, Laila. "Peran Perpustakaan Umum Dalam Meningkatkan Minat Baca MasyarakatKelurahanSridadiKecamatanMuaraBulianKabupatenBatang Hari." *UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2018): 1–71.

Ningrum, D. F. (2019). Kegiatan Inklusi Sosial Di Perpustakaan Ganesha Sma N 1 Jetis Bantul, 10(2), 123–131. Https://Doi.Org/10.20885/Unilib.Vol10.Iss2.Art9

Nur Asprijuli Mahaliyah, Ana Irhandayaningsih. "Analisis Penerapan Inklusi SosialOlehKantorArsipDanPerpustakaanDaerahKabupatenWonosobo Terhadap Pengguna." *Ilmu Perpustakaan* 8 (2019).

Purnomo. "Peranan Perpustakaan Umum Dalam Gerakan Literasi Informasi Sebagai Sarana Pembelajaran Sepanjang Hayat (Studi Analisis pada Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY)." *UIN Sunan Kalijaga*, no. 1 (2018): 1–107.

Rahma, N. M., Pratiwi, R. N., & VA, L. (2015). Strategi peningkatan minat baca anak (Studi Pada ruang baca anak perpustakaan umum dan arsip daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, *3*(5), 763-769.

Reza Mahdi dan Andi Asari. "Pemberdayaan Masyarakat oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial." *PKS* 19, no. 3 (2020): 255–263.

Silalahi, A. (2023). Pengaruh Kelengkapan, Keupdate-An Dan Penataan Koleksi Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pada Perpustakaan Universitas Hkbp Nommensen Medan.

Simarmata, R. (2017). Perspektif Inklusi Sosial Dalam Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Kebijakan Dan Tantangan Implementasi. Transformasi Sosial, 7–27

Utami, D. & Prasetyo, W. D. (2019). Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Pembangunan Masyarakat. Visi Pustaka, 21 (1), 31-38.

Permana, H. D. (2019). Apa Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Itu. [Online]. Diakses dari https://www.borneonews.co.id/berita/119307-apaperpustakaan-berbasis- inklusi-sosial-itu